

Pengumuman LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Harun	Kepala Sekolah SUPM Ladong	LHKPN telah verifikasi KPK 2025
2.	Marzuki	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	LHKPN telah verifikasi KPK 2025
3.	Reza Syahril	Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Telah melaporkan LHKPN, namun status menunggu verifikasi KPK (tersedia LHKPN 2024)
4.	Muhyidin	Bendahara Pengeluaran	LHKPN telah verifikasi KPK 2025
5.	Firdaus Husen	Bendahara Penerimaan	LHKPN telah verifikasi KPK 2025



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA : KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARUN
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 939545

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.200.000.000

1. Tanah Seluas 286 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah Seluas 70.000 m2 di KAB / KOTA ACEH TENGAH, Rp. 3.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 78.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.298.000.000

III. HUTANG Rp. 6.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.292.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN****UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA****UNIT KERJA : KELAUTAN DAN PERIKANAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MARZUKI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 68884

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.555.000.000

1. Tanah Seluas 50.000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, Rp.
2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m2/120 m2 di KAB / KOTA
ACEH BESAR, Rp. 55.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 186.000.000

1. MOTOR, Honda Supra X 125 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 136.320.542**F. HARTA LAINNYA** Rp. 143.000.000**Sub Total** Rp. 3.028.320.542**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.028.320.542

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : REZA SYAHRIAL
2. Jabatan : PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
3. NHK : 1015756

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	7.500.000
1. MOTOR, YAMAHA VIXION NAKED BIKE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	421.500.000

III. HUTANG **Rp.** **120.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **301.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Muhyiddin
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 412529

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 99.500.000

1. MOBIL, Toyota Avanza 1300 G Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
72.000.000
2. MOTOR, Honda NF 125 SD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000
3. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
11.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 8.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.500.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 110.000.000

III. HUTANG

Rp. 190.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. -80.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA :
KELAUTAN DAN PERIKANAN**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FIRDAUS HUSEN
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 999399

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	110.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1500 S Tahun 2010, HASIL SENDIRI		
Rp. 100.000.000		
2. MOTOR, HONDA METIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI	Rp.	
10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	111.000.000
III. HUTANG	Rp.	310.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-199.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.